

Masyarakat Pesantren dan Resolusi Konflik

Pesantren and Community Conflict Resolution

Ahmad Hasan Afandi
Universitas Islam Majapahit
hasan.pita@gmail.com

Abstrak

Menurut mayoritas kelompok santri, sejatinya, pesantren selalu mengedepankan budaya ta'dzim kepada wibawa seorang ustadz dan kyai, lebih-lebih adanya bingkai normatif yang mengikat, seperti ajaran kitab Ta'lim al-Muta'alim, yang tidak memungkinkan terjadinya konflik di dalamnya. Akan tetapi, yang terjadi, dinamika sosial pesantren yang masih menerapkan sistem manajemen pengelolaan sumber-sumber potensi berdasarkan figur seorang kyai (sebagai suatu panutan sekaligus pengambil kebijakan), sejatinya sangat rentan bagi tumbuhkembangnya sebuah konflik. Seperti yang banyak terjadi di pesantren-pesantren tradisional dan semi-modern, konflik terjadi, utamanya ketika sang kyai yang berposisi sebagai pendiri sekaligus pemilik pesantren meninggal dunia, atau ketika kyai pesantren, pendiri atau yang melanjutkan, para ustadz, pengasuh, atau juga para keluarga ikut melibatkan diri pada urusan di luar pesantren, misalnya kenegaraan, politik dan lain lain. Dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan teori penyelesaian sengketa, maka, tampak dengan jelas betapa penyelesaian resolusi konflik di pesantren seringkali ditempuh dengan cara-cara yang unik, di antaranya lewat perkawinan antar pesantren, istighotsah, haul dan akhirussanah. Dengan tahapan resolusi konflik melalui jalan silaturahmi sebagai proses pencegahan konflik, bahtsul matsa'il sebagai proses penekanan dan peyekatan konflik, Tabayun sebagai proses pengaturan dan pengelolaan konflik serta islah sebagai proses akhir penyelesaian konflik.

Kata Kunci : Resolusi, Konflik, Masyarakat, Pesantren

Abstract

According to the majority religious groups, in truth, always give priority boarding to the authority ta'dzim culture and a religious teacher Kyai, the more their binding normative frame, such as the doctrine of al-Muta'alim Ta'lim book, which does not allow the conflict in it. However, that happens, the social dynamics of schools that still apply the system of management of the potential sources based on a figure of clerics (as a role model at the same time policy makers), is actually very vulnerable to tumbuhkembangnya a conflict. As is the case in traditional Islamic boarding schools and semi-modern, conflicts occur, especially when the clerics who plays as the founder and owner of boarding dies, or when the pesantren, the founder or the resume, the teachers, caregivers, or also the family become involved in affairs outside of schools, for example, state, politics and others. By using descriptive analysis method with dispute resolution theory, then, is clearly visible how the settlement of conflict resolution in schools are often taken with unique ways, including through intermarriage boarding, istighotsah, haul and akhirussanah. By stage of conflict resolution through the streets silaturahmi as a process of conflict prevention, bahtsul matsa'il as the emphasis and peyekatan conflict, Tabayun as the process of setting and managing conflict and reconciliation as the final process of conflict resolution.

Keywords: Resolution, Conflict, Community, Pesantren

Pendahuluan

Sejauh ini, pesantren, sebagai suatu mandala atau sejenis padepokan, dipahami sebagai tempat yang sejuk tenang dan damai. Di dalamnya terdapat cantrik (santri) yang mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk belajar membentuk karakter, sementara, sang kyai menyerahkan diri dan jiwa mereka dengan tulus untuk memberikan pengajaran dan tauladan hidup (Hairus salim dalam Hamdan Farchan Syarifudin, 2004,). Solidaritas, kebersamaan, persaudaraan dan ketulusan antarwarga sungguh sangat kuat dan tumbuh sebagai karakter integral dari kehidupan pesantren.

Berbeda dengan definisi di atas, Nur Cholis Madjid (2009b) mengulas tentang pesantren itu sebagai bagian dari sistem pendidikan di Indonesia. Menurutnya, dari segi historis pesantren tidak identik dengan makna keislaman, akan tetapi, juga mengandung makna keaslian Indonesia (*indigenous*). Mengingat, sejatinya, lembaga yang serupa dengan pesantren sudah ada pada masa kekuasaan Hindu-Budha, sehingga, Islam tinggal meneruskan dan mengislamkan lembaga pendidikan yang sebelumnya sudah ada.

Bagi orang yang mengenal akrab tradisi pesantren atau yang selama ini hidup terbiasa di lingkungan pesantren, serta yang pernah menjadi santri atau memang terlahir dan besar di keluarga pesantren, maka, akan sangat terkejut, ketika ada yang menguak terjadinya suatu pertengkaran, konflik, permasalahan bahkan sampai menjadi suatu resolusi konflik di dalam lembaga pendidikan tersebut.

Menurut mayoritas kelompok santri, pesantren selalu mengedepankan kebudayaan *ta'dzim* kepada wibawa seorang ustadz dan kyai, lebih-lebih adanya bingkai normatif yang mengikat sebagaimana ajaran pada kitab Ta'lim al-Muta'alim (Kitab Kuning yang isinya mengajarkan sopan santun dan andap ashor, tata krama antara murid dan guru. Biasanya dipakai pedoman pada pesantren secara umum, baik di pesantren salaf maupun modern), sehingga tidak memungkinkan terjadi konflik di dalamnya.

Demikian juga pesantren yang dalam tradisinya mengembangkan paham *tawasuth* (tidak memihak), *tawazun* (menjaga keseimbangan dan keharmonisan), *tasamuh* (toleransi), *i'tidal*

(keadilan) dan *tasyawur* (musyawarah) seperti yang di himpun dalam *Ushul Al Khamsah*. Oleh sebab itu, di dalam suatu bingkai tradisi yang sedemikian rupa, maka, sungguh sangat mustahil benih-benih konflik bisa berkembang di pesantren. Menurut mereka, konflik apapun yang terjadi di suatu pesantren selalu bisa diselesaikan dengan baik lewat kharisma seorang kyai atau kewalian seorang pewaris nabi (tradisi yang dikembangkan). Dengan kata lain, ketika kyai *dawuh* atau dalam skala yang lebih besar memberikan tawsiyah pada semua pihak, maka, semua urusan pun langsung selesai.

Akan tetapi, yang terjadi, dinamika sosial pesantren yang masih menerapkan sistem manajemen pengelolaan sumber-sumber potensi berdasarkan figur seorang kyai (sebagai suatu panutan sekaligus pengambil kebijakan), sangat rentan bagi tumbuhkembangnya sebuah konflik di dalam lembaga pendidikan tersebut. Hal itu selaras dengan yang banyak terjadi di pesantren-pesantren tradisional dan semi-modern. Konflik terjadi, utamanya ketika sang kyai yang berposisi sebagai pendiri sekaligus pemilik pesantren tersebut meninggal dunia, atau ketika kyai pesantren, pendiri atau yang melanjutkan, para ustadz, pengasuh, dan juga para keluarga ikut melibatkan diri pada urusan di luar pesantren, misalnya kenegaraan, politik dan lain lain (Hamdan Farchan Syarifudin, 2004).

Dalam situasi demikian, suasana pesantren yang mulanya sarat dengan harmoni, kebersamaan, persaudaraan, dan ketulusan antarwarga biasanya ikut berubah akibat sikap dan pilihan hidup kalangan elitnya. Sejatinya, banyak contoh-contoh yang terjadi, hanya saja, kasus-kasus tersebut jarang terungkap. Mengingat, bagi kalangan pesantren, membeberkan apa yang sesungguhnya terjadi di pesantren (khusus yang negatif) adalah suatu hal yang tabu. Terlebih lagi yang menyangkut dapur keluarga pesantren, karena bisa mendatangkan tulah.

Kenyataan yang tersebut di atas, berkebalikan dengan apa yang dibayangkan banyak orang tentang pesantren yang adem ayem, jauh dari keingaran urusan duniawi --- menurut mereka pondok tempat orang menempa derajat spiritual keagamaan yang terbebas dari suasana konflik kepentingan dalam hal apapun, ternyata,

memendam suatu permasalahan yang sewaktu-waktu dapat menimbulkan dampak baik atau buruk bagi lembaga maupun orang yang tergabung di dalamnya. Terlebih ketika para elit terlibat dengan pelbagai urusan di luar pesantren.

Selanjutnya, untuk menjawab pelbagai persoalan yang muncul di tengah-tengah komunitas masyarakat majemuk, khususnya bagaimana realitas konflik yang tersembunyi di pesantren serta bagaimana resolusi konflik di pesantren, maka, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis (Sumardi, 2008), dan teori penyelesaian sengketa (Hamdan Farchan Syarifudin, 2004).

Konflik dalam Dunia Pesantren

Menurut data yang disampaikan oleh Departemen Pendidikan Agama Jombang tahun 2014, di kota tersebut terdapat lebih kurang 1600 pesantren dengan 5 pesantren modern, yakni Pondok Pesantren Darul 'Ulum Rejoso, Pondok Pesantren Tebuireng Diwek, Pondok Pesantren Bahrul 'Ulum Tambakberas, dan Pondok Pesantren Denanyar Jombang. Sebagai lembaga pendidikan keagamaan, sudah barang tentu, pesantren memiliki sistem dan tatanan sosial yang khas, sehingga sangat berbeda dengan komunitas masyarakat yang berkelindan dalam dinamika sosial dan tak luput dari konflik.

Konflik dalam kehidupan bisa diasumsikan sebagai relitas, konflik bisa terjadi antara individu dengan individu dengan komunitas masyarakat, atau antarkomunitas masyarakat. Konflik bisa terjadi di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja. Konflik bersifat vertikal bila terjadi antar sesama elit masyarakat, vertikal-horizontal, elit masyarakat versus masyarakat, maupun horizontal yakni benturan antar sesama masyarakat (Hamdan Farchan Syarifudin, 2004).

Tidak ada yang bisa menepis, di dunia pesantren, konflik adalah merupakan hal yang nyata. Namun bagi masyarakat pesantren, kenyataan tersebut dipahami sebagai hal yang tidak perlu diungkap dan dibesar-besarkan. Kecenderungan untuk tidak merespon konflik disebabkan bahwa perbedaan adalah merupakan realitas hidup dan pasti ada hikmah di balik itu --- hal ini merupakan suatu kesadaran bahwa perbedaan sebagai realitas bersumber dari norma agama. Dengan demikian,

secara teologis, pemaknaan perbedaan dipahami sebagai *sunnatullah* dan harus bersifat konstruktif yang membawa kepada kebajikan.

Selain karena landasan tersebut, faktor kultural juga menentukan dalam menyikapi konflik. Bagi masyarakat pesantren, mengungkap dan membesar-besarkan masalah adalah merupakan hal yang tabu --- hal tersebut selaras betapa konflik yang mencuat dari suatu institusi agama dapat menimbulkan aib dan pada gilirannya melahirkan sikap "diam itu emas" daripada memperbincangkan konflik yang terjadi. Dengan kata lain, nilai agama dan norma kultur yang tersebut di atas menciptakan suatu model dalam mengatasi konflik ala pesantren.

Oleh sebab itu, bila terjadi perbedaan yang rentan terhadap konflik bahkan manifes, biasanya, dunia pesantren mengatasinya dengan kultur yang diyakini masyarakat mempunyai kemampuan dan kapasitas dalam mengatasinya lewat peranan kyai sebagai individu yang diyakini merupakan elit tradisional dalam dunia pesantren.

Dalam hal ini, elit adalah merupakan aktor yang mempunyai kekuasaan, sehingga dapat dikatakan sebagai orang atau kelompok yang memegang posisi terkemuka dalam masyarakat (Suzane Keller, 1995). Sementara, Abdurrahman Wahid (1988) berpendapat peran kyai sebagai agen budaya bukan berarti kyai sebagai makelar budaya (*cultur broker*). Sebagai agen budaya karena kyai memiliki peran ganda, di satu sisi sebagai pengasuh, pemilik pesantren, pembimbing santri, pengayom umat, sedang di sisi lain ia sebagai asimilasi kebudayaan luar yang masuk ke pesantren. Dalam hal ini, Abdurrahman Wahid (dalam Greg Fealy dan Greg Barton, 1997) menyitir pendapat Hiroko Horikoshi bahwa peran sosial kyai menunjukkan betapa daya dorong dan perubahan itu datang dari pemikiran agama yang diiringi interaksi panjang dengan modernisasi.

Oleh sebab itu, banyak pesantren yang oleh pendirinya semula merupakan satu kesatuan instansi, dalam perjalanannya terbelah menjadi dua atau bahkan lebih. Pemisahan tersebut terjadi akibat adanya konflik di dunia pesantren yang timbul lantaran interes pribadi, kemudian menjadi konflik permanen dan berimbas pada konflik antar pesantren.

1. Model-model Konflik Pesantren

Jika diamati dengan saksama, maka, konflik dipesantren bisa dikategorikan dalam dua jenis. *Pertama* temporal, konflik jenis ini disebabkan oleh perseteruan antar pengasuh atau kyai pesantren, atau antar kyai pengasuh dalam satu pesantren. Dikatakan temporal karena konflik tersebut lebih bersumber dari individu yang dipicu oleh perbedaan dalam perilaku keorganisasian seorang kyai, baik dalam organisasi politik maupun organisasi masyarakat yang biasa diikuti oleh para kyai (NU).

Konflik temporal dapat digambarkan dalam kasus pemilihan organisasi NU --- ketika ada dua PBNU ---maka, banyak kyai pesantren saling konflik. Konflik antar individu ini pun selesai manakala PBNU menyatu kembali. Sementara, bila konflik individu tersebut tidak kunjung teratasi, maka, dapat dipastikan bisa menyebabkan spiral konflik dengan munculnya konflik baru yang bersifat permanen.

Kedua permanen, konflik ini berimbas pada institusi pesantren. Konflik permanen disebabkan oleh individu yang tidak terselesaikan atau akar konflik yang memang sudah ada di pesantren, yakni konflik politik, konflik keluarga dan perebutan kharisma di tingkat umat.

Sungguh layak untuk diketahui, khususnya pada wilayah Jombang yang merupakan kota santri. Menurut Turmudi (dalam Endang Turmudi, 2001), dalam mengawali perkembangan politik lokal, sejatinya, telah terdapat perbedaan paham tentang cara pandang berpolitik di kalangan nahdliyin ketika K.H. Musta'in Romly, pemimpin Pesantren Darul 'Ulum yang juga selaku Mursyid Tarekat *Qodiriyah wa Naqsabandiyah* diam-diam mendukung partai pemerintah, Golkar, dalam menyongsong pemilu 1977.

Sudah barang tentu, dukungan ini tidak saja menandai penyimpangan dan gangguan terhadap struktur sosial yang ada, akan tetapi, juga menunjukkan adanya gejala perpecahan di antara kyai di Jombang yang kemudian diikuti oleh perbedaan paham/konflik tersembunyi di antara para pengikutnya. Perbedaan paham ini terjadi di kalangan para kyai khususnya di internal NU yang mempertahankan afiliasi dengan satu-satunya partai Islam, PPP, sementara Kyai Musta'in beserta rekan-rekan dekatnya berafiliasi pada Golkar.

Sudah barang tentu, kenyataan tersebut di atas membuat umat Islam di Jombang yang mulanya disatukan oleh sebuah etos politik Islam menjadi terpecah. Singkat kata, perpindahan dukungan Kyai Musta'in dari PPP ke Golkar, membuat ia ditinggal oleh para pengikutnya. Kecuali para pengikut setia tarekat pimpinannya serta para santri di pesantrennya. Bagi para pengikut setianya, sikap Kyai Musta'in, tidak menimbulkan masalah dan menganggap ajarannya masih tetap benar. Mereka juga menekankan keharusan adanya ketaatan yang mutlak terhadap guru sepanjang ia tidak syirik (Endang Turmudi, 2001).

2. Akar Konflik Dunia Pesantren

Sejatinya, konflik di dunia pesantren tidak terlepas dari akar atau latar belakang mengapa konflik tersebut muncul, sehingga dapat diketahui sejauh mana sifat konflik yang terjadi dari yang laten sampai manifes. Dari hasil beberapa penelitian menggambarkan, bahwa akar konflik di dunia pesantren terbagi dalam empat hal: pertama; konflik keluarga, kedua; politik yang merupakan penyebab dominan dan eskalasinya cukup mengemuka, ketiga; perebutan pengaruh terhadap umat, hal ini sangat terkait dengan eksistensi seorang kyai dan pesantrennya, dan keempat; feodalisme yang mempunyai ciri sistem sosial hubungan antara kyai-santri. Hal lain yang melatarbelakangi konflik adalah manajemen, karena sangat berkaitan dengan sistem pengelolaan dan pengembangan pesantren.

3. Konflik Dunia Pesantren dalam pandangan Masyarakat

Dunia pesantren memandang konflik sebagai hal yang biasa, pendapat ini bersumber dari pemahaman normatif tentang diakuinya perbedaan dan diyakini sebagai suatu kewajaran yang biasa membawa rahmat. Namun demikian, masyarakat pesantren tidak menghendaki adanya konflik dan selalu berharap agar setiap konflik dapat segera terselesaikan.

Kyai Khairul Fuad (dalam Hamdan Farchan Syarifudin, 2004) berpendapat Secara umum, tidak seorangpun kyai menghendaki bila konflik tersebut membawa mudhorot bagi orang lain. Konflik sengaja dan segera dilokalisir agar tidak membias dan tidak melibatkan orang

banyak. Bahkan cenderung disederhanakan agar tidak dijadikan komoditas oleh pihak-pihak tertentu yang ingin mengambil keuntungan. Namun tidak dapat dipungkiri, ada pula kyai yang memperlakukan konflik sebagai komoditas untuk mendapatkan keuntungan materiil maupun popularitas.

Kemungkinan konflik bisa membawa mudhorot, sungguh sangat disadari oleh pesantren. Sehingga, bila konflik muncul, maka, ada keinginan yang kuat untuk segera menyelesaikannya --- atau andaikan konflik tersebut menjurus ke manifes --- sesegera mungkin dapat dilokalisir dan disederhanakan agar tidak menjadi bahan komoditas. Kekhawatiran bahwa konflik bisa dimanfaatkan oleh pihak tertentu diakui oleh Kyai Khoirul Fuad. Walau begitu, mayoritas kyai pesantren mengaku tidak punya kepentingan terhadap konflik yang terjadi.

Namun tidak semua konflik bersumber dari internal, faktor-faktor eksternal juga berpengaruh besar atas peristiwa konflik yang terjadi di pesantren. Sikap kyai dalam menyikapi konflik yang disebabkan oleh faktor eksternal terbilang unik, kyai tampak resisten atau jika situasi politik menuntut, antar kyai seolah berkonflik.

Jika diamati dengan saksama, pada masa orde baru, konflik antar kyai terkadang sengaja diciptakan. Misalnya konflik yang terjadi antara Kyai Ali Asy'ad yang menjadi Juru Kampanye PPP dengan Kyai Syaiful Mujab yang menjadi Juru Kampanye Golkar. Sebagaimana ketika Kyai Mustain selaku Mursyid Tharikat Qodiriyah Wannaqsabbandiya Ponpes Darul 'Ulum Jombang mendukung Golkar, sedang Kyai Adnan Ali Cukir mendirikan *Jamiyah Ahli Thariqat al Mutabarahan Nadhiyah* pada muktamar di Semarang di rentang 1979 yang berafiliasi dengan PPP. Seperti biasa, menjelang kampanye, masing-masing pihak menyusun isu untuk menyerang partai lawannya. Sudah barang tentu, dampak perseteruan itu berimbas pada institusi pesantren yang dipimpin oleh keduanya lantaran figur kyai menjadi panutan bagi para santrinya.

Secara teologis, masyarakat pesantren tidak memahami konflik dalam makna destruktif, mengingat perbedaan adalah merupakan rahmat Allah. Pemahaman tersebut menumbuhkan kesadaran pluralisme dan pemikir yang terbuka.

Sarwani pengurus pesantren Al-Munawir (dalam Hamdan Farchan Syarifudin, 2004) menuturkan konflik di pesantren jangan dipahami sebagai konflik dalam pengertian laten atau manifes, akan tetapi, yang ada sebenarnya hanyalah merupakan perbedaan pendapat. Dan itu adalah hal yang lumrah.

Lebih lanjut, menurut Sarwani, masyarakat pesantren menyangkal bahwa konflik yang terjadi di dunia pesantren sama dengan konflik sosial yang terjadi di masyarakat umum. Menurut mereka, konflik yang terjadi hanya sebatas bentuk perbedaan yang masih dapat ditolerir dalam norma pesantren. Hal ini juga di sampaikan Ida Fatimah Zainal (Pengasuh Pondok Pesantren Al Munawir Krapyak Yogja) "secara institusi, pesantren tidak boleh dilibatkan bila terjadi perbedaan antar individu karena pada dasarnya perbedaan itu suatu realitas. Perbedaan adalah rahmat. Artinya, bila ada konflik antar individu kyai jangan sampai berimplikasi terhadap institusi pesantren, sebab bila hal itu terjadi, maka, akan jadi laten dan bersifat institusional antar pesantren.

Selaras dengan yang tersebut di atas, sejatinya, ada hal yang selama ini dijadikan pedoman masyarakat pesantren dalam menyikapi konflik, yakni tidak mau mengungkapkan konflik yang terjadi di antara mereka. Rasa tabu itu didasari oleh norma agama yang tidak boleh menyebarkan kejelekan dan dianjurkan untuk menutupi cacat sesama saudara.

Resolusi Konflik Pesantren

Tujuan dari resolusi konflik adalah terselesaikannya konflik secara tuntas dan mewujudkan perdamaian. Model-model resolusi konflik yang ada di dunia pesantren hakikatnya adalah untuk menyelesaikan konflik. Dengan landasan teologi Aswaja (Ahlussunah Waljama'ah) lalu diformulasikan dengan kultur yang ada, kemudian upaya resolusi konflik dilakukan oleh masyarakat pesantren.

Namun demikian upaya penyelesaian tidak selamanya mulus seperti yang diharapkan. Dari model resolusi konflik yang dijalankan oleh mereka, ternyata, mendapatkan hasil yang berbeda; *pertama*, konflik tuntas dengan baik dan tercipta kondisi seperti sediakala; *kedua*, konflik selesai hanya di tingkat permukaan dan akhirnya menjadi

bom waktu; ketiga, konflik selesai dengan model sparasi, yakni munculnya pesantren baru atau memisahkan diri dari pesantren induk, dan cara ini juga dianggap sebagai penyelesaian masalah.

1. Nilai Dasar Penyelesaian Konflik

Berkait dengan yang tersebut di atas, sejatinya, nilai normatif agama dalam masyarakat pesantren tidak bisa dilepaskan dari wacana dan gerak praktis kehidupan mereka sehari-hari. Begitu juga dinamika dan lanskap kemasyarakatannya, tidak bisa lepas dari teologi keberagaman yang dikembangkannya.

Tradisi keilmuagamaan yang dikembangkan masyarakat pesantren bertumpu pada aswaja (ahlusunnah waljamaah), doktrin ini berpangkal pada tiga panutan inti: paham Al Aryari dan Al Maturidi, mengikuti salah satu dari empat madzhab fiqih, dan mengikuti cara yang ditetapkan Junaidi al Baghdadi dalam bertarekat dan bertasawuf.

Dalil naqli sumber rujukan yang bersifat nash adalah Al Quran dan Sunnah Nabi yang menjadi rujukan pertama dalam menghasilkan resolusi konflik. Dalil aqli adalah resolusi konflik yang sumber hukumnya berdasarkan pada akal pikiran (ijtihad) --- adapun dua hal yang termasuk pendapat ulama dalam sumber hukum adalah ijma' dan qiyas setelah dilakukan rujukannya --- sehingga didapat hasil resolusi konflik yang tepat untuk dijalankan.

Selain empat sumber hukum tadi, terdapat dasar nilai lainnya adalah fatwa ulama yang mengacu pada pokok tujuan syariat, yaitu lima prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus ditegakkan yang dikenal dengan istilah Ushul al Khamsah.

2. Kontribusi Kyai dalam Penyelesaian

Kontribusi kyai menjadi penting ketika ia mampu menjalankan perannya sesuai dengan norma yang dipegang masyarakat pesantren. Meski di situ tak ada syarat baku bagi seorang kyai dalam menyelesaikan konflik, akan tetapi, ia tetap harus mampu berpijak pada norma yang selama ini telah dianutnya.

a. Kyai sebagai Hakam

Sebagaimana kita ketahui, dalam pesantren,

kyai menempati posisi yang strategis. Kedudukan yang demikian tidak terlepas dari konstruksi sosial yang ada di dalamnya. Kedudukan tersebut tidak hanya berpengaruh pada masyarakat pesantren saja, akan tetapi, juga berpengaruh terhadap masyarakat di lingkungan sekitarnya. Pesantren dapat diibaratkan merupakan kerajaan kecil dengan kyai sebagai sumber mutlak dari kekuasaan dan kewenangan dalam kehidupan di lingkungan tersebut.

Peran kyai adalah sebagai mediator. Peran yang memiliki dua model ini biasanya dilakukan oleh seorang atau beberapa kyai (tim), pertama berfungsi sebagai fasilitator yang mempertemukan kedua pihak yang berkonflik untuk meminta fatwa dari sang kyai dan/atau sebagai mediator sekaligus pemberi fatwa terakhir untuk memutuskan penyelesaian konflik.

b. Kyai sebagai pemberi Fatwa

Pengambilan keputusan bisa dilakukan oleh tim mediasi ataupun menyerahkan kepada kyai yang lebih disegani, dan bila fatwa telah dikeluarkan, maka, tim mediasi maupun pihak yang berkonflik harus mentaatinya. Dengan kata lain, di sini, kyai bertindak sebagai uswah atau menjadi hakim agung; "apa yang menjadi keputusannya harus dipatuhi".

Hal tersebut sungguh sangat wajar, mengingat sifat tawadhu, yakni rendah hati tidak mau menang sendiri merupakan hal yang selalu dikedepankan oleh kyai sehingga ia benar-benar layak dianggap sebagai panutan. Sudah barang tentu, dalam konteks ini, mufti, berbeda dengan yang ada pada institusi keagamaan islam yang telah diformalkan dan mengikat secara hukum karena keberadaannya merupakan bagian dari konstitusi negara.

Dalam kehidupan pesantren, mufti sebagai pemberi tausiyah mempunyai bobot fatwa yang harus ditaati. Oleh sebab itu, dalam konteks politik, tausiyah juga sangat rentan dimasuki oleh pelbagai unsur kepentingan baik pada proses maupun hasilnya.

3. Kontribusi Nilai Kultur Pesantren dalam

Resolusi Konflik

a. Perkawinan antar pesantren

Pada mulanya, tradisi ini adalah untuk menjalin tali silaturahmi, lalu dikembangkan dalam pola silaturahmi yang lebih dalam berupa jalinan perkawinan antarkeluarga kyai. Sudah menjadi tradisi bagi kyai mengawinkan anggota keluarganya dengan keturunan kyai atau santri yang pandai. Dengan demikian, diharapkan, keberlangsungan kepemimpinan pesantren dapat terjaga dan antarkyai saling terikat dalam ikatan kekerabatan yang kuat.

Tradisi perjodohan dalam pesantren tidak hanya sebatas kekerabatan, akan tetapi, karena tiga hal, yaitu: pertama ingin menguatkan eksistensi seorang kyai serta pesantrennya. Kedua, menjaga keberlangsungan pesantren dan ketiga menjaga eksistensi keturunan.

Dari model tradisi perkawinan antarkerabat kyai yang tersebut di atas, kita dapat mengambil dampak positif ketika terjadi konflik, yaitu upaya resolusi bisa lebih mudah dilakukan karena terjalannya kekerabatan, serta saling mengingatkan agar reputasi mereka sebagai panutan masyarakat dan kehormatan sebagai kyai dapat terus terjaga dengan secara baik.

b. Kekerabatan

Kekerabatan yang dibangun membentuk sistem jaringan sosial pesantren. Dengan kata lain, bila seorang santri keluar dan menjadi alumni biasanya mendirikan pesantren di daerah asalnya, dari sini, maka, terbentuklah hubungan antara pesantren induk dan pesantren lokal.

Berkait dengan yang di atas, sistem kekerabatan antara kyai-santri tidak hanya terjadi ketika seorang santri dalam masa pendidikan di pondok, namun, akan terus berlangsung meski ia telah menjadi alumni karena adanya hubungan sanad (penerimaan ilmu).

Dari kultur kekerabatan inilah, maka, pesantren memiliki fungsi-fungsi sosial seperti: dekat dengan lingkungan masyarakat, kyai tidak protokoler, rata-rata yang menjadi santri adalah kelompok ekonomi menengah kebawah, sehingga membentuk suatu sistem sosial yang sangat kuat.

c. Istighosah

Kegiatan doa bersama yang dilakukan

oleh orang luar maupun dalam pesantren serupa dengan mujahadah, namun sifatnya insidental karena terkait dengan hajat yang mendesak. Aktivitas istighosah terkait langsung dengan penyelesaian konflik, sebab dalam istighosah biasanya terdapat unsur-unsur yang bisa meredakan konflik; yakni karena dihadiri oleh kyai dan mereka yang berkonflik dan adanya komunikasi ketika duduk bersama dalam suatu forum yang diisi dengan ceramah agama serta wejangan yang menyejukkan hati.

d. Haul

Acara memperingati wafatnya pengasuh, pendiri sebuah pesantren atau memperingati wafat seorang kyai atau wali yang ketika wafatnya telah genap satu tahun. Dalam pesantren tidak semua orang diperingati hari kewafatannya kecuali bagi mereka yang telah diakui ketokohnya oleh umat, seperti kyai, pengasuh pesantren dan tokoh ormas keagamaan.

Peringatan haul biasanya merupakan rangkaian acara yang padat, dan diisi dengan halaqoh, perlombaan, bazar, ceramah agama dan puncaknya adalah ritual membacakan manaqib dan zikir tahlil. Di sini mereka yang sedang berkonflik tidak tabu untuk hadir, sehingga, suana semacam ini juga menjadi salah satu bentuk dari peredaman konflik.

e. Mujahadah

Kegiatan doa bersama yang diadakan oleh sebuah pesantren atau di luar pesantren yang tujuannya hanya sebatas mendekatkan diri kepada Tuhan yang dilakukan dengan rutin. Seperti halnya istighosah, kegiatan semacam ini juga menjadi netral untuk dihadiri oleh mereka yang sedang berkonflik.

e. Akhir Sanah

Acara tutup tahun dari aktivitas belajar mengajar di pesantren. Kegiatan ini seperti halnya haul yang isinya padat dan diakhiri oleh tabligh akbar serta pelantikan bagi mereka yang telah tamat. Pada kesempatan ini, tidak jarang diisi dengan hiburan berupa gambus ataupun kasidah --- dan dihadiri oleh seluruh masyarakat pesantren, wali santri, alumni dan masyarakat sekitar. Boleh dikata, kegiatan tersebut menjadi

media pertemuan tatap muka impersonal bagi masing-masing pihak yang berkonflik, sehingga dirasa mampu untuk memudarkan benih-benih konflik yang tengah terjadi.

4. Tahapan Resolusi Konflik

a. Silaturahmi sebagai proses pencegahan Konflik

Berbagai kasus yang bisa menimbulkan konflik disebabkan oleh kesalahpahaman. Hal tersebut lebih mudah teratasi oleh silaturahmi sebab dalam momen silaturahmi terjadi relasi yang saling terbuka, upaya peringatan dini (*erly warning*) dengan sendirinya dapat berjalan sekaligus ada unsur reaksi cepat (*rapid responses*) bila terjadi konflik di antara mereka. Dalam momen silaturahmi tidak jarang seorang kyai yang tadinya saling mencera dapat bertemu dan bertegur sapa.

Dalam konflik yang bersifat internal, silaturahmi dipandang efektif sebagai alat di dunia pesantren. Konflik internal yang umum terjadi adalah konflik keluarga. Demikian juga konflik antar pesantren, santri dapat diselesaikan dengan model silaturahmi, bahkan konflik antar santri yang menelan korban jiwa seperti halnya kasus di pondok Darul 'Ulum Rejoso Jombang --- pada rentang Januari 2016 terjadi perkelahian antar santri yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan ditengahi oleh pengurus Pondok --- meski secara hukum tetap diproses karena telah merenggut jiwa seseorang, namun, secara horisontal berhasil terselesaikan.

Silaturahmi juga efektif sebagai media resolusi dengan dunia luar pesantren. Pesantren yang sedang berkonflik dengan partai tertentu dapat menjadi reda ketika pesantren tersebut mau menerima kunjungan tokoh partai politik atau pejabat pemerintah yang sedang berseteru dengannya.

Peristiwa konflik lantaran silaturahmi pejabat sering terjadi di zaman Orde Baru. Waktu itu, kalangan pesantren *salaf* sengaja mengkucilkan beberapa kyai akibat mau menerima pejabat dan tokoh Golkar; seperti di pesantren Yogyakarta, Jombang dan lain-lain. Di era kepemimpinan Megawati silaturahmi pun terjadi. Pesantren Al Masyuriyah Sukabumi Jawa Barat – salah satu pendukung utama Gus Dur mengeluarkan

keputusan membela presiden Gus Dur saat mau dilengserkan sebagai upaya jihad. Akan tetapi, setelah Gus Dur lengser, pesantren tersebut tetap mau menerima kunjungan Taufik Kemas, suami Presiden Megawati yang mengantikan Gus Dur. Respon masyarakat juga tidak terlalu ekstrim dalam mengomentari sebuah silaturahmi politik di dunia pesantren, mereka menyadari, bahwa kedatangan seorang tokoh membawa keberuntungan bagi kedua belah pihak.

Sebagai tahapan pencegahan, silaturahmi merupakan bentuk komunikasi yang di dalamnya terdapat unsur: 1). Komunikasi yakni dua pihak atau lebih; 2). Media yang dijadikan alat komunikasi, dalam dunia pesantren bisa berupa even keagamaan atau saling mengunjungi; 3). Pesan atau isi komunikasi. Model silaturahmi dijadikan model pencegahan.

Pencegahan merupakan bentuk pendekatan yang harus dipadukan dengan pendekatan lainnya dengan secara simultan agar penyelesaian konflik dapat terlaksana. Tiga pendekatan yang dimaksud seperti dijelaskan Hugh Miall dalam bukunya *Contemporary Conflict Resolustion: perdamaian (peace keeping)*, mendorong transisi dan transformasi konflik dengan upaya membentuk perdamaian (*peace making*) dan mendorong rekonsiliasi dengan membangun perdamaian (*peace building*) (Lambang Trijono, 2001).

Kyai Shonhaji, pengasuh pesantren Wahid Hasyim mengaku efektivitas forum silaturahmi sebagai media peredam konflik; “Cara menghindari konflik yang efektif itu melalui forum silaturahmi, dengan silaturahmi semua berjalan terbuka tidak ada yang tertutup-tutupi”. Silaturahmi mengajarkan hidup tidak menang sendiri dan tumbuh kesadaran toleransi, sikap toleransi menghasilkan hidup lebih hidup, komunikasi pun berjalan harmonis.

b. Bahtsul Masa'il sebagai Proses Penekanan Konflik dan Penyekat Konflik

Bahsul Masa'il (*problem solving dialogue*) di dalam konflik pesantren merupakan aspek penekanan sekaligus penyeikat konflik. Dalam Bahsul Masa'il terjadi proses dialog untuk menyelesaikan persoalan. Konflik yang muncul disekat dalam ruang lingkup yang sempit agar

terlokalisir sehingga tidak berdampak buruk. Miftahul Huda pengurus Pesantren Nurul Umah menjelaskan fungsi *Bahsul Masa'il* sama dengan musyawarah dalam menyekat konflik, musyawarah dilakukan dengan jalan bebas mengungkap segala pendapat kemudian dicari solusinya. Walaupun terjadi gesekan perbedaan, akan tetapi, ketika sudah menjadi keputusan harus ditaati oleh semua pihak.

Subtansi penekanan dan penyekatan konflik melalui *Bahsul Masa'il* (*problem solving dialogue*) diadopsi dari ayat Alqur'an. tentang musyawarah (Q.S; Asy Syuura (42) ayat 38), Ali Imran (3) Ayat 159), mereka meyakini segala persoalan dapat di atasi dengan jalan musyawarah. Kesemua itu dijabarkan dengan tahapan 1). Bila ada persoalan adakan dialog; 2). Dialog mengedepankan sikap santun dan toleransi; 3). Mau memaafkan terutama dari pihak yang dirugikan agar proses rekonsiliasi bisa berjalan lancar.

Selanjutnya, subtansi penyekatan dan penekanan konflik dalam *Bahsul Masa'il*, selain atas inisiatif sendiri, juga difasilitasi oleh pihak luar yang masih dari kalangan pesantren seperti salah satu lembaga NU atau lembaga yang dikelola orang-orang NU semacam LkiS. *Bahsul Masa'il* (*problem solving dialogue*) mengenal dua model; pertama semi formal; yakni menggunakan dialog bersifat longgar, pesertanya bebas. Kedua formal, bahasanya lebih bersifat *fiqhiyah* (perspektif hukum islam) dan secara umum dapat bersentuhan langsung dengan kehidupan di luar masyarakat pesantren.

Sementara, *Bahsul Masa'il* (*problem solving dialogue*) yang bersifat formal dilakukan oleh institusi payung masyarakat pesantren, yakni NU. Dalam Ormas Nu, masing-masing tingkatan organisasi diberi kewenangan untuk melakukan *Bahsul Masa'il* baik di tingkat pusat (PBNU), provinsi (PWNNU), kabupaten (PCNU), kecamatan (Ancab NU) dan desa (ranting NU). Akan tetapi, secara umum, pelbagai kasus dengan masyarakat akan dibawa ke tingkat pusat bersamaan dengan momen muktamar NU, Rakernas NU atau munas alim ulama NU. Hasil bahasanya kemudian didokumentasikan dalam bentuk buku lalu disebar ke masyarakat pesantren.

Demikian juga dengan konflik yang terjadi

di pesantren Darul 'Ulum Rejoso mengenai dukungan yang dilakukan oleh Kyai Mustain selaku Mursyid Tharikat Qodiriyah Wannaqsabbandiyah Ponpes Darul 'Ulum Jombang yang mendukung Golkar menjelang pemilu 1977, padahal, ia telah dilantik sebagai ketua Umum Jamiyah Ahli Tarekat Indonesia (JATMI) pada 1965 oleh NU. Langkah Kyai Mustain telah mengakibatkan perpecahan antar jamaah yang telah dibina sejak 1965 berbalik meninggalkan tarekat Rejoso karena telah berafiliasi dengan Golkar, sementara, para jamaah dan kyai-kyai NU berafiliasi dengan PPP. Kemudian, resolusi konflik yang dilakukan oleh organisasi NU diputuskan pada acara Muktamar di Semarang pada 1979 untuk mendirikan organisasi baru *Jamiyah Ahli Thariqat al Mutabarrah an Nadhiyah* (JATMAN) dengan mengangkat Kyai Adnan Ali Cukir sebagai mursid tarekat tersebut yang berpusat di Cukir Diwek Jombang.

c. Tabayun sebagai pengaturan dan Pengelolaan Konflik.

Dalam istilah pesantren, tabayun berarti klarifikasi atas suatu persoalan. Unsur yang terdapat dalam tabayun adalah : 1). Menghadirkan pihak yang berkonflik; 2). Mediator yang diterima oleh masing-masing pihak yang berkonflik; 3). Masing-masing pihak yang berkonflik menjelaskan persoalan; 4). Pihak mediator menawarkan solusi penyelesaian dan 5). Persetujuan bersama bentuk penyelesaian.

Selaras dengan yang tersebut di atas, pengelolaan konflik di dunia pesantren dilakukan dengan landasan normatif agama yang difokuskan dalam bentuk kaidah fiqih; 1. Kemadhorotan dapat dihilangkan; 2) Bila ada dua kemadhorotan, maka, diambil salah satunya yang lebih ringan; 3). Tidak boleh membuat kemadhorotan; 4). Apabila tidak mendapatkan semua, maka, jangan ditinggal semua. Dan 5). Mengkompromikan dua persoalan sama-sama baik.

Kaidah-kaidah tersebut di atas menjadi landasan dalam mengelola konflik. Adapun, bentuk teknis yang terdapat melalui tabayun (klarifikasi) tidak lain adalah mengandung ajaran agar tidak mengeksploitasi konflik. Berpijak dari hal itu, maka, kyai cenderung tidak memperpanjang masalah namun tetap mengakui apabila terjadi kesalahan pada masing-masing personal.

d. Islah Sebagai Proses Akhir Penyelesaian Konflik.

Islah berasal dari bahasa Arab, artinya saling berbaik. Bila terjadi konflik, maka, islah dimaknai sebagai upaya rekonsiliasi. Islah tingkatnya lebih tinggi daripada tabayun, unsur yang terdapat dalam islah adalah : 1). Kesiediaan pihak yang berkonflik untuk rekonsiliasi; 2) Pihak yang berkonflik hadir dalam satu forum; 3). Ada mediator yang dapat diterima dari pihak yang berkonflik; 4). Pihak mediator menawarkan solusi penyelesaian; 5). Persetujuan bersama-sama bentuk penyelesaian (deklarasi); 6). Melanjutkan kesepakatan perjanjian damai dan 7). Mediator berkewajiban memantau perkembangan kesepakatan damai.perjanjian

Islah gagal apabila ada pihak yang tidak mematuhi perjanjian. Dalam dunia pesantren, istilah digunakan apabila eskalasi konflik sangat kuat dan masing-masing pihak sulit berdamai. Sikap defensif biasanya terjadi pada mereka yang sama-sama mempunyai reputasi dan banyak pengikut. Bila situasi semacam ini terjadi, maka, beberapa kalangan pesantren yang memiliki kewibawaan langsung mengupayakan pihak yang berkonflik untuk segera melakukan islah. Dalam hal ini, kyai *sepuh* (kyai yang dituakan) sering diminta untuk mendamaikan mereka yang tengah berkonflik.

Islah juga sering digunakan dalam konflik politik, seperti perseteruan Gus Dur dengan Suharto yang diakhiri dengan kunjungan Gus Dur ke Suharto saat menjelang kejatuhan Orde baru, atau konflik Golkar kubu Abu Rizal Bakri versus kubu Agung Laksono diakhiri dengan jalan islah meskipun melalui tahapan jalur hukum mediasi lewat Wapres Jusuf Kala, serta konflik PPP yang ditengahi dengan jalan islah oleh kyai sepuh KH. Maimun Zubair. Dalam hal ini, masyarakat umum melihat telah terjadi islah di antara keduanya. Kemudian, untuk mengatasi konflik antara pesantren versus masyarakat setempat, maka, islah juga dijadikan jalan akhir bila upaya-upaya lain mengalami kebuntuan.

Tujuan lain dari islah adalah terlaksananya penyelesaian konflik secara tuntas dan tidak merugikan masing-masing pihak. Oleh sebab itu, apabila proses damai dapat berjalan, maka,

hakikat islah telah terwujud sesuai dengan yang dianjurkan agama. Dengan kata lain, substansi islah adalah terwujudnya perdamaian sejati.

Simpulan

Dari berbagai konflik tersembunyi yang terjadi pesantren, sering kali bermula ketika sang kyai yang berposisi sebagai pendiri sekaligus pemilik pesantren tersebut meninggal dunia. Atau hal yang sama juga terjadi ketika kyai pesantren, pendiri atau yang melanjutkan, para ustadz, pengasuh, atau juga para keluarga ikut melibatkan diri pada urusan di luar pesantren, kenegaraan, politik dan lain-lainnya.

Oleh sebab itu, upaya meredam resolusi konflik pesantren seringkali ditempuh dengan media perkawinan antar pesantren, istighotsah, haul dan acara akhirussanah. Dari berbagai acara rutinitas yang dilakukan oleh pesantren, maka, dapat dipastikan para individu yang sedang berkonflik akan mendatangi acara tersebut, sehingga sangat dimungkinkan menjadi ajang untuk memulai islah di antara mereka yang sedang bersengketa atau berkonflik. Secara tegas dapat dikatakan, tahapan resolusi konflik dilakukan melalui jalan silaturahmi sebagai proses pencegahan konflik, bahtsul matsa'il sebagai proses penekanan dan peyelesaian konflik, tabayun sebagai proses pengaturan dan pengelolaan konflik serta islah sebagai proses akhir penyelesaian konflik.

Selanjutnya, cara-cara di atas dapat juga digunakan untuk menyelesaikan konflik-konflik di luar pesantren seperti halnya konflik politik, seperti perseteruan Gus Dur dengan Suharto yang diakhiri dengan kunjungan Gus Dur ke Suharto saat menjelang kejatuhan Orde Baru, atau konflik Golkar kubu Abu Rizal Bakri versus kubu Agung Laksono yang diakhiri dengan jalan islah meski melalui tahapan jalur hukum yang dimediasi oleh Wapres Jusuf Kala, konflik PPP yang ditengahi dengan jalan islah oleh kyai sepuh KH. Maimun Zubair.

Kepustakaan

- Fealy, Greg dan Greg Barton (ed). 1997. *Tradisionalisme Radikal Persinggungan Nahdatul Ulama Negara*. Yogyakarta: LkiS.
Keller, Suzane. 1995. *Penguasa dan Kelompok*

- Elit*. Jakarta: Radjawali Press.
- Majid, Nurcholis. 2009a. *Bilik-Bilik Pesantren*. Jakarta: Paramadina Dian Rakyat.
- _____, 2009b. *Merumuskan Kembali Tujuan Pendidikan Pesantren*. Jakarta: Paramadina Dian Rakyat.
- Syarifudin, Hamdan Farchan. 2004. *Titik Tengkar Pesantren*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Trijono, Lambang. 2001. *Keluar dari kemelut Maluku*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Turmudi, Endang. 2001. *Perselingkuhan Kyai dan Kekuasaan*. Jakarta: LP3ES.
- Wahid, Abdurrahman. 1988. *Pesantren sebagai Subkultur dalam Pesantren dan Pembaharuan*. Jakarta: LP3ES.
- Suryabrata. Sumardi. 2008. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.



SEKOLAH PASCASARJANA ILMU POLITIK
Universitas Nasional



SEKOLAH PASCASARJANA ILMU POLITIK
Universitas Nasional